

Implementasi Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government Di Kabupaten Semarang

Oleh:

Epiphany Sinaga, Sri Suwitri, Muhammad Mustam*)

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Progress information technology as well as the potential for extensive use, opening opportunities for access, management and utilization of information in large numbers quickly and accurately. There is also the problem that this aspect of the barrier to the development of e-Government in terms of understanding the implementor of the presidential instruction No. 3 of 2003, the lack of financial resources and human resources, the lack of sharing of information between government agencies and the uneven condition of Semarang Regency environment political, economic and social technology. And the purpose of this research was to describe the implementation of presidential instruction No. 3 of 2003 and to identify aspects that hinder the development of e-Government in Semarang Regency. This research uses qualitative research with purposive technique. Informants are chosen as much as 4 with interviews. Implementation development refers to the theories of Donald Van Meter and Van Horn and Daniel A. Mazmanian Paul A. Sabatier include: implementation of presidential instruction No. 3 of 2003, the characteristics of the policy issues, and environmental policy. The results of this research show that the implementation of presidential instruction No. 3 of 2003 still relatively good. Still the limited financial resources, implementor understanding and human resources as well as unequal conditions of political, economic and social environment and the technology becomes less the maximum factor of results achieved by the Government of Semarang Regency. As for the recommendation on the implementation of this is the increased understanding of the implementor by doing socialization, increased quality and quantity of human resources with skills training in the field of information technology and the consciousness of every Government Agency (SKPD) giving information as up to date in the development of e-Government.

Keywords: Implementation, electronic government, presidential instruction.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam jumlah yang besar secara cepat dan akurat. Ada pun yang menjadi masalah yaitu aspek penghambat pengembangan *e-Government* dari segi pemahaman implementor terhadap Inpres no.3 tahun 2003, kurangnya sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia, kurangnya budaya berbagi informasi antar instansi pemerintah Kabupaten Semarang dan ketidakmerataan kondisi lingkungan sosial politik, ekonomi dan teknologi. Dan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Inpres no.3 tahun 2003 dan untuk mengidentifikasi aspek yang menghambat pengembangan *e-Government* di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan teknik purposive. Informan dipilih sebanyak 4 orang melalui wawancara. Implementasi pengembangan *e-Government* mengacu pada teori Donald Van Meter dan Van Horn dan Daniel A. Mazmanian Paul A. Sabatier: implementasi inpres no. 3 tahun 2003, karakteristik masalah kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi inpres no.3 tahun 2003 masih berjalan relatif baik. Masih terbatasnya pemahaman implementor, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia serta ketidakmerataan kondisi lingkungan sosial politik, ekonomi dan teknologi menjadi faktor kurang maksimalnya hasil yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Adapun rekomendasi terhadap implementasi ini ialah peningkatan pemahaman implementor dengan melakukan sosialisasi, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan dibidang teknologi informasi dan kesadaran setiap instansi pemerintah (SKPD) pemberian informasi secara *up to date* dalam pengembangan *e-Government*.

Kata kunci : *Implementasi, electronic government, Instruksi Presiden*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *e-Government*. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku, dengan melalui pemanfaatan *e-Government* menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. *e-Government* menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. *E-Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Hal ini didasarkan pada jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat. Menurut survei yang diselenggarakan

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terungkap bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi negara ini. Tahun depan (2013), angka itu diprediksi naik sekitar 30 persen menjadi 82 juta pengguna dan terus tumbuh menjadi 107 juta pada 2014 dan prediksi meningkatnya pada tahun mendatang (2015) sekitar 139 juta (50 persen total populasi).

Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan *e-Government*, melalui Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan *e-Government* yang juga

sudah dilengkapi dengan berbagai Panduan tentang *e-Government* seperti : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Website Pemerintah daerah; dan lain-lain.

Kabupaten Semarang sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, telah mulai menerapkan konsep *e-Government* di dalam kegiatan pemerintahannya. Kabupaten Semarang telah memiliki alamat *website* yang dapat diakses di www.semarangkab.go.id sebagai tahap awal dari pengembangan *e-Government* pada pemerintah daerah. *website* tersebut juga menjadi sarana interaksi antara pemerintah, masyarakat dan juga pihak swasta.

Pada tahun 2012 setiap daerah dilengkapi dengan telepon sebagai penghubung internet, masih ada daerah di Kabupaten Semarang yang belum siap mengaktifkan layanan pengembangan daerahnya yang di batasi akan sumberdaya manusia yang terbatas dalam pengoperasiannya. Dari data terdapat tiga daerah (Kaliwungu, Bencak, dan Tuntang) yang tidak menjalankan layanan pengembangan internet (jumlah internet pengguna broadband) meskipun diantara kecamatan tersebut telah di sediakan fasilitas pendukung pengembangan *e-Government* (fasilitas broadband internet) yang hampir disetiap kecamatan sudah disediakan. Hal ini disebabkan karena jumlah staff pelaksana terbatas maka hal yang harus dilakukan dengan peningkatan *skill* /kemampuan para pelaksana di setiap daerah.

Di dalam perkembangannya, *e-Government* mengalami perkembangan yang *stagnant* (tidak berjalan). Setelah dikeluarnya Inpres ini dapat dikatakan bahwa perkembangan implementasi *e-Government* masih jauh dari harapan. Masih banyak lembaga pemerintah, baik di pusat

maupun daerah, yang belum menganggap *e-Government* sebagai prioritas. *e-Government* hanya dipandang sebagai proyek yang harus diikuti dan menjadi trend di kalangan pemerintahan.

Perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah merupakan instrumen untuk terciptanya sebuah transformasi peranan pemerintah, dari yang bersifat birokrasi, menjadi sebuah lembaga yang berorientasi proses untuk melayani pelanggannya, yang dalam hal ini adalah masyarakat, komunitas bisnis (industri) dan para *stakeholder* lainnya. Kabupaten Semarang, memutuskan untuk mengimplementasi kan *e-Government* karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan, akan memberikan sejumlah manfaat (Indrajit.R.E, dkk. 2005:5).

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis serta mengidentifikasi aspek yang menghambat tentang implementasi kebijakan undang – undang no. 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di Kabupaten Semarang.

Teori yang digunakan Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Donald Van Meter dan Carl Van Horn, 1975. Wahab, 2006:65).

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan

bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. (Leo Agustino, 2006 :141)

1. Model yang Dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* (model proses implementasi kebijaksanaan). Tipologi kebijaksanaan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn :

- a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja / kinerja implementasi dipisahkan oleh sejumlah variable bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variable-variabel bebas itu ialah:

- 1) Ukuran dan Tujuan kebijakan
- 2) Sumberdaya
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
- 6) Disposisi implementor.

2. Implementasi Kebijakan Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983). Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of problems*).
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ablity of statute or structure implementation*).

3. Lingkungan Kebijakan (*monstatutory variables affecting implementasi*).

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,.

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian ini adalah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (bagian pengelolaan data *electronic*).

Pada penelitian ini, informan diambil secara *purposive*. Artinya informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian, yaitu Implementasi Inpres no.3 tahun 2003 tentang Pengembangan *e-Government*. Para informan dipilih karna mereka dianggap mampu menjawab masalah dalam penelitian karna mereka terlibat langsung dalam pengembangan *e-Government* ini.

Dalam penelitian Implementasi Inpres no.3 tahun 2003 di Kabupaten Semarang terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data-data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dan observasi/pengamatan langsung.
2. Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa yang sudah ada sebelumnya berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Wawancara dilakukan berdasarkan pada interview guide yang telah dibuat sebelumnya yang berisi pertanyaan-pertanyaan, dimana melalui interview guide peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam. studi pustaka diambil dari buku-

buku, laporan penelitian, undang-undang, peraturan daerah, surat kabar, jurnal, serta literatur lainnya baik dari media cetak maupun elektronik. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan gambar secara langsung pada saat melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. jenis penelitian ini bertujuan untuk untuk memaparkan mengenai bagaimana Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government*. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi program Jampersal, sebagai berikut:

I. Implementasi *Electronic Government* di Kabupaten Semarang berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003

1. Cara membangun motivasi

Sesuai Sistematika lampiran pertama (I) Inpres No. 3 tahun 2003 diawali dengan penjelasan motivasi kebijakan *e-Government* yang menginginkan berbagai tuntutan perubahan sesuai dengan isi Inpres no 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang dimana motivasi pengembangan *e-Government* yaitu pemerintah Kabupaten Semarang menuntut adanya perubahan pemerintahan dari sistem manual

ke sistem yang lebih cepat (elektronik) dan menginginkan kelancaran komunikasi antara pemerintah Kabupaten Semarang dengan para stakeholdernya yang dalam hal ini merupakan instansi pemerintah (SKPD), pihak swasta dan masyarakat.

2. Tujuan Pengembangan *e-Government*

Tujuan dari implementasi *e-Government* di Kabupaten Semarang adalah sudah terlaksananya pembuatan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam perwujudan *website* pemerintah daerah dan fasilitas dialog publik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, media informasi dan transparansi publik.

3. Strategi Pengembangan

1. Pengembangan sistem layanan yang handal dan terpercaya dan terjangkau oleh masyarakat luas. Di dalam Inpres no.3 tahun 2003 sesuai dengan strategi pengembangan *e-Government* menyatakan bahwa di dalam pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya telah dilakukan dengan pengembangan portal-portal instansi SKPD dan situs resmi *website* Kabupaten Semarang melalui penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah. Kabupaten Semarang telah melakukan perluasan dan peningkatan jaringan komunikasi ke seluruh wilayah di Kabupaten Semarang sampai saat ini telah mencapai kecamatan dan kelurahan hampir di 19 kecamatan yang ada dengan tarif terjangkau dengan pembentukan jaringan organisasi pendukung *wireless*.

2. Dalam menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah sudah terlaksana dengan baik dalam mengembangkan sistem pelayanan *website* (portal pemerintah) secara holistik yang dibantu oleh Humas Sekretariat yang dimana Bagian PDE sebagai pengelola *website*.
3. Memanfaatkan teknologi secara optimal. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan layanan publiknya dengan bekerja sama dengan instansi yang ada, misalnya dalam pengembangan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting* yang dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dalam transaksi informasi dan pelayanan publik.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. kelompok-kelompok luar yang telah bekerja sama dalam melakukan pengembangan *e-Government*, diantaranya pihak PT.Telkom yang telah menyediakan bandwidth dari server ke jaringan internet yang ada dan menyediakan *tower wearless*.
5. Dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kualitas ketersediaan SDM Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) juga belum memadai, Adapun di dalam pengembangan sumberdaya manusia di PDE pada setiap tahunnya terus dilakukan peningkatan dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai PDE dan SKPD dalam mengembangkan (*up to date*) berbagai informasi elektronik daerah.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Di Kabupaten

Semarang barulah pada tahap ke dua. Pada tahap pertama, Kabupaten Semarang sesuai dengan tahapannya telah membuat *website* resmi pemerintah daerah (www.semarang.go.id). Tahap kedua, telah disediakan Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (online), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online seperti pembuatan e-KTP.

II. Aspek Penghambat Implementasi INPRES No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di Kabupaten Semarang.

1. Karakteristik Masalah Kebijakan
 - a. masih kurangnya pemahaman Implementor mengenai Inpres no.3 tahun 2003, hal ini terlihat bahwa pegawai di PDE belum mengetahui secara jelas dan rinci tentang isi dari Inpres no.3 guna mengembangkan pelaksanaan *e-Government*, yang dimana implementasi Inpres no. 3 tahun 2003 yang merupakan landasan pembangunan *e-Government*.
 - b. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Kabupaten Semarang hanya diperoleh dari APBD (tahun 2013) pemerintah Kabupaten Semarang, sehingga pemerintah harus mengalokasi dana secara efisien.
 - c. kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam kaitannya menyusun kajian atau aplikasi (*sharing data/*

informasi) pengembangan *e-Government*.

2. Lingkungan Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn, dampak dari kondisi-kondisi diatas pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Dukungan sosial politik dalam pengembangan *e-Government* terkait dengan regulasi, dimana masih minimnya peraturan Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai pengembangan *e-Government* yang dapat menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintahan Kabupaten Semarang belum menunjukkan keseriusannya yang penuh terhadap pengembangan *e-Government*. Dukungan ekonomi ini informasi yang diperlukan adalah yang berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan dalam pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, gaji dan upah, tingkat pendapatan masyarakat yang mempengaruhi dalam pengembangan *e-Government*. Dukungan teknologi bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang masih dalam tahap memanfaatkan akan perkembangan teknologi di dalam pengembangan *e-Government*.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa implementasi Inpres no.3 tahun 2003 di kabupaten Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan Inpres no.3 tahun 2003. Adapun tahapan yang ada sesuai isi Inpres no.3 tahun 2003 yaitu cara membangun motivasi pengembangan *e-Government*; yang dimana perubahan dalam sistem dan proses kerja dari manual ke elektronik dalam peningkatan kelancaran informasi

antar instansi pemerintah (SKPD Kabupaten Semarang) berjalan dengan baik di Kabupaten Semarang dalam layanan publik seperti; layanan perijinan, layanan kependudukan, layanan pajak dan lain sebagainya. Tujuan dan strategi pengembangan *e-Government* dalam pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang cepat dan dengan biaya yang terjangkau belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya teknologi informasi pemberian pelayanan yang terpadu mengenai tujuan pengembangan *e-Government* di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan dan efisiensi sudah dalam proses terlaksana, adapun strategi pengembangan *e-Government* yang ada masih belum terlaksana sepenuhnya. Terlihat dari sumber daya manusia yang masih terbatas khususnya pegawai pengembangan *e-Government*.

Faktor penghambat belum berhasilnya implementasi Inpres no.3 tahun 2003 disebabkan oleh 2 faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan *e-Government* di kabupaten Semarang, yakni karakteristik masalah kebijakan yang berupa pemahaman implementor terhadap Inpres no. 3 tahun 2003 yang belum sepenuhnya implementor mengetahui keberadaan Inpres no.3 tahun 2003 sebagai landasan pengembangan *e-Government*, kurangnya kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia dalam pelaksanaan penggunaan teknologi informasi yang disediakan Kabupaten Semarang. terbatasnya ketersediaan finansial yang hanya berasal dari APBD, kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam kaitannya menyusun kajian atau aplikasi pengembangan *e-Government*, dan lingkungan kebijakan yang berupa pengaruh kondisi sosial politik, ekonomi dan serta penguasaan teknologi

yang belum mendukung pengembangan *e-Government*.

2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran pemahaman bagi implementor (pemerintah Kabupaten Semarang dan PDE) untuk menjadikan Inpres no.3 tahun 2003 sebagai landasan dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Semarang. Untuk mewujudkannya dimulai dengan peningkatan pemahaman implementor setingkat pimpinan terhadap isi Inpres no.3 tahun 2003, kemudian dapat disosialisasikan terhadap implementor pelaksana teknis yang selanjutnya ditejemahkan ke dalam sebuah rancangan pengembangan *e-Government* yang mengarah pada pencapaian tujuan Inpres no.3 tahun 2003 dengan mendasarkan pada pengembangan *e-Government* melalui langkah-langkah strategi dan pengembangan yang sesuai teknis operasional pengembangan *e-government* yang tertuang di dalam Inpres no.3 tahun 2003.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, maka hendaknya dilakukan peningkatan SDM dengan melalui pelatihan-pelatihan yang dapat diadakan dengan bekerjasama dengan pihak luar yang berkompeten di bidang TI,
3. Anggaran pengembangan *e-Government* di Kabupaten Semarang masih terbatas dikarenakan sumber finansial/dana yang ada hanya bersumber dari APBD saja. Adapun hal yang dilakukan untuk mengatasi

keterbatasan dana ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dengan cara kerjasama dalam bentuk sponshorship maupun bentuk investasi.

4. Meningkatkan kerjasama antar setiap SKPD dalam pemberian informasi dalam meningkatkan komunikasi antar SKPD untuk dapat mengembangkan *e-Government*. Dengan pemanfaatan dan pengoptimalan kinerja dari infrastruktur yang sudah ada, sehingga koneksi jaringan wireless di Kabupaten Semarang dapat berjalan dengan baik.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2006. "Politik dan Kebijakan Publik". Bandung : AIPI Bandung

Eko Indrajit, Richardus. 2005. " E-Government In Action", Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta : Andi

Mazmanian, Daniel A, et.al.1983. Implementation and Policy. USA: Scott, Foreman and Company

Sumber Internet

1. Data Dalam Angka Kabupaten Semarang Tahun 2013 (<http://www.bappedakab.go.id/utama/>)
2. Data RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten

Semarang 2010-2015
(<http://www.bappedakab.go.id/utama/>)

3. Data ILPPD (INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
2011
(<http://www.semarangkab.go.id/utama/>)
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2003. Tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government.
(<http://www.semarangkab.go.id/utama/>)
5. Bastian, 2003, "*Perkembangan 'E-
government' di Indonesia*", diakses dari
[www.bappenas.go.id/getfileservlet/node/
5412/](http://www.bappenas.go.id/getfileservlet/node/5412/), pada tanggal 24 Maret 2011,
Pukul 20.12 WIB
6. [www.asosiasipenyelenggarajasainternet.
com](http://www.asosiasipenyelenggarajasainternet.com)